



Katalog BPS : 9207.53

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN 2000 - 2003



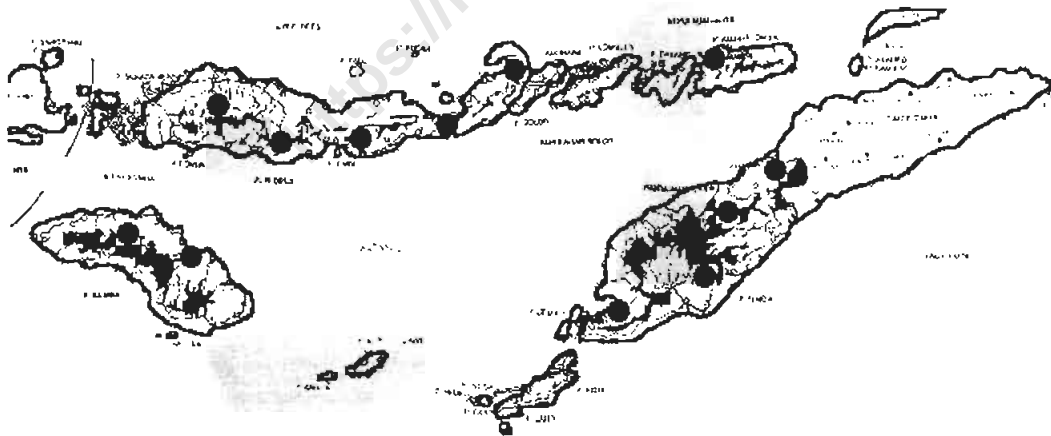
BPS

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



Katalog BPS: 9207.53

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT PENGGUNAAN
2000 – 2003**



BPS Badan Pusat Statistik
Propinsi Nusa Tenggara Timur

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT PENGGUNAAN
2000–2003**

<https://ntt.bps.go.id>

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN 2000–2003

ISSN : 0854 – 9303
Nomor Publikasi : 53552.0001
Katalog BPS : 9207.53
Ukuran Buku : 21 cm × 28 cm
Jumlah Halaman : vii + 51

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:

*Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. R. Suprpto No. 5, Kupang 85111*

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN
2000–2003**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Relia Panjaitan

Penyunting : Margiyan

Penulis : Margiyan
Yuliana Esther

Pengolah Data : Lies Alfiah
Yuliana Esther
Sofan
M.P.A.Riwu Dake

<https://ntt.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan 2000-2003 merupakan lanjutan dari publikasi sejenis yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Publikasi ini disusun oleh Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur.

Selain menyajikan berbagai tabel dasar dan turunan tentang data Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur yang dirinci menurut komponen penggunaan, dalam publikasi ini disajikan pula analisis deskriptif tentang perkembangan perekonomian Nusa Tenggara Timur dari sisi penggunaan pada kurun 2000-2003. Untuk lebih memperjelas berbagai terminologi yang digunakan, disajikan pula konsep, definisi dan metodologi penghitungan yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini.

Data tahun 2003 yang disajikan masih bersifat sangat sementara. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat sampai dengan batas waktu penerbitan, beberapa data masih belum terkumpul secara lengkap. Penyempurnaan dan revisi terhadap data tersebut akan dilakukan pada penerbitan berikutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Kritik dan saran untuk penyempurnaan publikasi di masa datang sangat diharapkan.

Kupang, Oktober 2004

 Kepala Badan Pusat Statistik
Nusa Tenggara Timur.



Ir. Relia Panjaitan. MS.
NIP. 340004678

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Tabel-Tabel Lampiran	vii
I. Pendahuluan	2
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2 PDRB Menurut Komponen Penggunaan	3
1.3 Konsep dan Definisi	5
1.4 Metode Penghitungan dan Sumber Data	8
II. Tinjauan PDRB Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan	13
2.1 Komposisi Penggunaan PDRB	14
2.2 Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB	18
III. Perkembangan Peranan PDRB Sektoral	20
3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	21
3.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	22
3.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	24
3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	26
3.5 Ekspor dan Antar Pulau Neto	28
Tabel-Tabel Lampiran	32-50
Daftar Pustaka	51

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1a. Komposisi Penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Berlaku	15
2.1b. Komposisi Penggunaan PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku .	17
2.2 Laju Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB NTT Atas Dasar Harga Konstan 1993	19
3.1 Proporsi Konsumsi Rumahtangga Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kelompok Pengeluaran. Nusa Tenggara Timur	22
3.2 Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumahtangga Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Kelompok Pengeluaran, Nusa Tenggara Timur	22
3.3 Proporsi Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Lembaga. Nusa Tenggara Timur	23
3.4 Laju Pertumbuhan Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Jenis Lembaga. Nusa Tenggara Timur .	24
3.5 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenisnya, Nusa Tenggara Timur	25
3.6 Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Jenisnya, Nusa Tenggara Timur	26
3.7 Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Asal Barang, Nusa Tenggara Timur	27
3.8 Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Asal Barang. Nusa Tenggara Timur	28
3.9 Neraca Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau Atas Dasar Harga Berlaku, Nusa Tenggara Timur	29
3.10 Komposisi Komponen Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau Atas Dasar Harga Berlaku, Nusa Tenggara Timur	30
3.11 Laju Pertumbuhan Komponen Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau Atas Dasar Harga Konstan 1993, Nusa Tenggara Timur	31

DAFTAR TABEL-TABEL LAMPIRAN

Halaman

1. Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur, Tahun 2000-2003	33
2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan, Tahun 2000-2003	34
3. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan, Tahun 2000-2003	35
4. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Menurut Penggunaan, Tahun 2000-2003	36
5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan, Tahun 2000-2003	37
6. Konsumsi Rumahtangga Nusa Tenggara Timur, Tahun 2000-2003	38
7. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Nusa Tenggara Timur, Tahun 2000-2003	39
8. Konsumsi Pemerintah Nusa Tenggara Timur, Tahun 2000-2003	40
9. Pembentukan Modal Tetap Bruto Nusa Tenggara Timur, Tahun 2000-2003 ...	41
10. Ekspor Neto Nusa Tenggara Timur, Tahun 2000-2003	42
11. Penggunaan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Yang Berlaku, Tahun 2000-2003	43
12. Penggunaan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1993, Tahun 2000-2003	44
13. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Yang Berlaku Menurut Penggunaan, Tahun 2000-2003	45
14. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Penggunaan, Tahun 2000-2003	46
15. Indeks Perkembangan Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Yang Berlaku Menurut Penggunaan, Tahun 2000-2003	47
16. Indeks Perkembangan Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Penggunaan, Tahun 2000-2003	48
17. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Yang Berlaku Menurut Penggunaan, Tahun 2000-2003	49
18. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Penggunaan, Tahun 2000-2003	50

I. PENDAHULUAN

- ✓ *Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*
 - ✓ *PDRB Menurut Komponen Penggunaan*
 - ✓ *Konsep dan Definisi*
 - ✓ *Metode Penghitungan dan Sumber Data*

I. PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang umum digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya perekonomian suatu wilayah. Jika PDRB suatu wilayah semakin besar maka semakin besar pula sumber daya ekonomi di wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya.

Untuk menghitung PDRB dapat digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pengertian PDRB pada masing-masing pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Pada pendekatan produksi**, PDRB didefinisikan sebagai jumlah dari semua nilai yang berhasil ditambahkan terhadap barang dan jasa melalui kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua unit ekonomi yang ada di suatu wilayah (region) dalam periode waktu tertentu (umumnya satu triwulan atau satu tahun).
- b. **Pada pendekatan pendapatan**, PDRB adalah jumlah dari seluruh balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi oleh semua unit ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.
- c. **Pada pendekatan pengeluaran**, PDRB merupakan jumlah dari pengeluaran konsumen akhir atas barang dan jasa akhir di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Barang dan jasa akhir yang dimaksudkan dalam hal ini adalah barang dan jasa yang tidak digunakan sebagai input dalam suatu kegiatan produksi. Sedangkan konsumen akhir terdiri dari rumah tangga, lembaga nirlaba, pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor (sebagai pengurang).

Hasil penghitungan PDRB berdasarkan ketiga pendekatan tersebut secara teori tidak akan berbeda satu sama lain. Namun demikian dalam prakteknya sering terdapat selisih atau diskrepansi statistik yang merupakan akibat dari kekurangakuratan data.

PDRB suatu wilayah pada umumnya dihitung dengan menggunakan dua sistem penilaian, yaitu:

- a. **Penilaian atas dasar harga berlaku**. Dalam sistem penilaian ini maka seluruh barang dan jasa yang dijadikan sebagai dasar penghitungan PDRB dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada periode penghitungan.

- b. Penilaian **atas dasar harga konstan**. Dalam sistem ini maka barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung PDRB dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada periode tertentu yang dijadikan sebagai periode dasar. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan dalam publikasi ini dilakukan dengan menggunakan harga tahun 1993 sebagai tahun dasar.

Hasil penghitungan PDRB dengan dua sistem penilaian tersebut memiliki kegunaan yang berbeda. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat ukuran atau skala perekonomian suatu wilayah, dan juga menjadi dasar untuk mengamati struktur perekonomian suatu wilayah. Sementara PDRB atas dasar harga konstan lebih banyak digunakan untuk mengamati perkembangan tingkat produksi dari seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga konstan juga merupakan data dasar yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

1.2 PDRB Menurut Komponen Penggunaan

Produk dari suatu kegiatan produksi dapat dikelompokkan menjadi dua sesuai dengan pemanfaatannya, yaitu **produk antara** dan **produk akhir**. Produk antara adalah produk dari suatu unit ekonomi yang digunakan sebagai input dalam kegiatan produksi yang dilakukan oleh unit ekonomi lain. Sedangkan produk akhir adalah produk yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi dan langsung digunakan atau dikonsumsi sebagaimana adanya, tanpa melalui kegiatan produksi lebih lanjut.

Seperti yang telah disinggung pada sub bab sebelumnya, jumlah dari semua produk (barang dan jasa) akhir yang dikonsumsi oleh seluruh konsumen akhir (bukan untuk kepentingan produksi) di suatu wilayah akan sama dengan PDRB wilayah tersebut. PDRB yang dihitung dengan menggunakan pendekatan inilah yang dikenal sebagai PDRB menurut komponen penggunaan.

Produk akhir dari suatu kegiatan ekonomi pada dasarnya memiliki dua kegunaan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan untuk investasi. Produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mencakup semua produk yang habis digunakan atau dikonsumsi selama periode penghitungan, dan tidak digunakan untuk menghasilkan produk lain. Dengan demikian, produk yang dikonsumsi secara ekonomi telah 'keluar' dari aktivitas produksi. Sementara produk yang digunakan untuk investasi mencakup semua barang dan jasa yang tidak habis digunakan dalam periode penghitungan dan secara otomatis akan menambah akumulasi 'kesejahteraan' wilayah.

Dengan menggunakan simbol Y untuk PDRB, C untuk konsumsi dan I untuk investasi, maka dapat dituliskan hubungan identitas:

$$Y = C + I$$

Dalam hubungan ini tersirat bahwa pendefinisian C dan I harus dibuat sedemikian rupa sehingga seluruh PDRB yang dihasilkan oleh suatu wilayah telah benar-benar habis digunakan, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk kepentingan investasi.

Penggolongan permintaan terhadap produk akhir (disebut sebagai permintaan akhir) menjadi konsumsi dan investasi memang terasa sangat sederhana dan agregatif. Pada kenyataannya, baik konsumsi maupun investasi terdiri dari berbagai jenis pengeluaran.

Pengeluaran konsumsi secara umum dapat dibedakan menjadi konsumsi perorangan dan konsumsi publik. Konsumsi perorangan mencakup konsumsi yang dilakukan rumahtangga dan lembaga nirlaba (tidak mencari untung). Ciri dari konsumsi perorangan adalah (i) mencakup pengeluaran perorangan dalam kapasitas sebagai pribadi dan (ii) pengeluaran tersebut harus berupa barang dan jasa yang habis digunakan maksimal dalam satu tahun. Pengeluaran dari lembaga nirlaba dicakup sebagai komponen konsumsi karena pada kenyataannya lembaga atau institusi jenis ini memang tidak melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Sementara itu konsumsi publik mencakup pengeluaran konsumsi terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi yang dicatat dalam hal ini hanyalah pengeluaran atas barang dan jasa yang habis digunakan pada tahun berjalan, sedangkan pengeluaran untuk membangun jalan dan sejenisnya dicakup dalam investasi.

Secara sederhana, pengeluaran untuk investasi akan mencakup semua jenis pengeluaran untuk barang dan jasa yang tidak habis digunakan dalam tahun berjalan. Pengeluaran investasi pada umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan level perekonomian, semisal peningkatan kapasitas untuk menghasilkan pendapatan atau kepuasan di masa yang akan datang. Pengeluaran investasi pada dasarnya dapat dibedakan atas investasi domestik dan investasi luar wilayah. Investasi domestik terdiri dari pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok. Sedangkan investasi luar wilayah berupa ekspor dan antar pulau keluar dikurangi dengan impor dan antar pulau masuk.

Dengan demikian hubungan identitas dalam perekonomian dapat digambarkan secara lebih rinci sebagai berikut:

$$Y = C_h + C_g + I_f + I_s + (X - M)$$

di mana Y = PDRB, C_h = konsumsi rumahtangga dan lembaga nirlaba, C_g = konsumsi pemerintah, I_f = pembentukan modal tetap domestik bruto, I_s = perubahan stok, X = ekspor dan antar pulau keluar, dan M = impor dan antar pulau masuk.

Masing-masing peubah pada sisi sebelah kanan dari persamaan identitas tersebut pada hakekatnya merupakan komponen penggunaan dari PDRB suatu wilayah. Atau dengan kata lain jelas bahwa PDRB suatu wilayah dapat dirinci menurut penggunaannya, yaitu untuk konsumsi (rumahtangga, lembaga nirlaba, pemerintah) dan investasi (pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, ekspor dan antar pulau keluar, dikurangi impor dan antar pulau masuk).

Penyusunan PDRB menurut komponen penggunaan memiliki peran yang cukup penting, terutama untuk melakukan analisis pola permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu entitas ekonomi. Melalui analisis ini dapat diketahui masing-masing proporsi PDRB yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau investasi. Jika proporsi konsumsi terlalu besar dapat diduga bahwa peningkatan kapasitas perekonomian di wilayah yang bersangkutan akan relatif berat, karena sumber daya yang digunakan untuk investasi akan mengecil. Dari analisis ini juga dapat diketahui seberapa besar 'kebocoran' yang harus diderita sebagai akibat dari besarnya barang dan jasa yang harus didatangkan dari luar wilayah untuk memenuhi permintaan yang ada. Bagi perencana pembangunan di bidang ekonomi informasi ini tentu saja dapat memperkaya masukan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang akan diambil.

1.3 Konsep dan Definisi

Sesuai dengan uraian pada bagian terdahulu maka PDRB menurut penggunaan dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir, baik untuk keperluan konsumsi maupun investasi. Dalam publikasi ini permintaan akhir dikelompokkan menjadi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor dan antar pulau keluar. Mengingat untuk memenuhi permintaan tersebut ada sebagian barang yang harus didatangkan dari luar wilayah Nusa Tenggara Timur, maka jumlah dari seluruh komponen tersebut harus dikurangi dengan nilai impor barang dan antar pulau masuk.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam menghitung setiap komponen penggunaan tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa untuk tujuan konsumsi dan habis digunakan dalam periode satu tahun, dikurangi dengan hasil penjualan netto barang-barang bekas dan sisa. Pengeluaran konsumsi rumahtangga mencakup pengeluaran untuk bahan makanan, minuman, pakaian, bahan bakar dan jasa. Pembelian barang-barang yang tidak dapat direproduksi seperti hasil karya seni, barang-barang antik dan lain-lain juga dicatat sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Selain itu pengeluaran konsumsi rumahtangga mencakup juga pembelian barang-barang modal yang dapat diraba seperti mobil, motor, furniture, radio dan lain-lain yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi. Namun demikian pembelian rumah tidak dicakup. Pengeluaran untuk sewa rumah dan perbaikannya, pengeluaran untuk rekening listrik, air, telepon dan lain-lain juga dicatat sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Begitu juga pengeluaran untuk pemakaian jasa dari pihak lain (jasa kesehatan, pendidikan, rekreasi/hiburan dan jasa lainnya) dicakup dalam pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dihitung berdasarkan konsep pengeluaran konsumsi rumah tangga penduduk (residen), yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga yang menetap di suatu wilayah domestik ditambah dengan pembelian langsung oleh rumah tangga penduduk di luar wilayah, dikurangi dengan pengeluaran bukan penduduk yang dilakukan di wilayah yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba meliputi pembelian dan penerimaan transfer dalam bentuk barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penyusutan dan pajak tak langsung neto yang dibayar oleh lembaga yang bersangkutan, dikurangi penjualan barang dan jasa yang dihasilkan. Lembaga swasta nirlaba adalah lembaga/badan swasta yang dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan. Contoh lembaga swasta nirlaba adalah organisasi serikat buruh, persatuan para ahli, organisasi pelatih, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, dan sebagainya yang khusus melayani masyarakat dan tidak menciptakan keuntungan untuk lembaga.

Unit usaha dari lembaga swasta ini bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Lembaga swasta nirlaba yang keuangan dan pengawasan sepenuhnya atau sebagian besar ditangani oleh pemerintah, merupakan bagian dari pengeluaran kegiatan pemerintah dan tidak dicakup dalam pengeluaran lembaga swasta nirlaba.

c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup semua jenis pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi

pemerintahan sipil dan pertahanan. Dalam hal ini pemerintah yang dimaksudkan terdiri dari departemen, lembaga non departemen dan lembaga pemerintah lainnya serta pemerintah daerah tingkat I, tingkat II dan pemerintah desa. Pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh badan usaha milik pemerintah seperti Perum, Perjan, Perseroan, PN dan sebagainya tidak dicakup di sini, karena kegiatan dari masing-masing badan usaha tersebut merupakan kegiatan produksi.

Pengeluaran konsumsi pemerintah antara lain terdiri dari pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang. Termasuk di dalamnya belanja perjalanan, pemeliharaan dan pengeluaran lain yang bersifat rutin. Penerimaan dari hasil kegiatan produksi barang dan jasa tidak dicakup ke dalam pengeluaran konsumsi pemerintah.

d. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

Pembentukan modal tetap domestik bruto mencakup pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam wilayah dan pembelian barang modal baru dan bekas dari luar wilayah. Barang modal yang dimaksudkan adalah barang atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi dan pada umumnya memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun.

Pembentukan modal tetap domestik bruto dapat berupa pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi atau dalam bentuk mesin dan alat perlengkapan lainnya. Barang-barang yang tidak diproduksi kembali seperti tanah dan cadangan mineral tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Akan tetapi pengeluaran untuk meningkatkan penggunaan tanah seperti pembukaan hutan untuk dijadikan areal perkebunan, daerah pemukiman, bendungan dan lain-lain serta pengeluaran untuk perluasan areal pertambangan merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto. Penjualan neto dari barang-barang modal bekas dan barang-barang afkiran dari dalam daerah juga tidak termasuk dalam penghitungan pembentukan modal tetap bruto karena barang-barang tersebut sudah dihitung sebagai barang modal pada waktu pertama kali dibeli. Pembelian atau pembuatan barang-barang tahan lama untuk keperluan perlengkapan militer seperti barang-barang untuk pertahanan, tank, alat-alat persenjataan, bangunan konstruksi dan barang-barang pertahanan lainnya tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto karena barang-barang konstruksi yang digunakan militer tersebut bersifat konsumtif dan diperlakukan sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah.

e. Perubahan Stok

Perubahan stok merupakan selisih antara stok pada akhir tahun dengan stok pada awal tahun. Stok yang dimaksudkan adalah barang jadi yang belum sempat

digunakan, barang setengah jadi dan barang-barang masih dalam proses penyelesaian, baik yang merupakan barang konsumsi maupun barang modal. Stok barang konsumsi dapat disimpan oleh rumahtangga, pedagang (di toko) atau oleh perusahaan. Begitu juga stok modal dapat disimpan oleh rumahtangga atau pelaku ekonomi lain.

Bangunan yang belum selesai tidak termasuk dalam stok tetapi dimasukkan ke dalam komponen pembentukan modal tetap. Stok barang pada pemerintah adalah barang-barang yang dibeli untuk keperluan strategi seperti bahan pangan dan bahan bakar yang disediakan guna keperluan pada waktu kritis. Tanaman hutan dan tanaman keras yang belum diambil hasilnya tidak termasuk dalam stok, akan tetapi pemeliharaan ternak untuk dipotong dikategorikan sebagai stok.

f. Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor merupakan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Kegiatan ekspor dan impor dapat berupa ekspor dan impor barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, komunikasi, pariwisata dan jasa lainnya. Pembelian langsung oleh penduduk negara lain yang dilakukan di suatu negara dicatat sebagai ekspor dari negara tempat terjadinya transaksi. Sedangkan pembelian langsung oleh penduduk suatu negara yang dilakukan di luar negeri diperlakukan sebagai impor oleh negara yang bersangkutan.

g. Antar Pulau Keluar dan Masuk

Konsep antar pulau keluar dan antar pulau masuk sama dengan konsep untuk ekspor dan impor, hanya saja lingkup transaksinya terbatas pada antar daerah di suatu negara.

1.4 Metode Penghitungan dan Sumber Data

Penghitungan setiap komponen penggunaan dalam PDRB Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan pendekatan yang berbeda satu sama lain. Hal ini disesuaikan dengan ketersediaan data yang digunakan sebagai dasar penghitungan. Secara singkat metode penghitungan dan sumber datanya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Konsumsi Rumahtangga

Data dasar yang digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi rumahtangga adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sayangnya SUSENAS tidak diselenggarakan setiap tahun. Sehingga untuk tahun-tahun yang data SUSENAS-nya tidak tersedia, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga

terpaksa diestimasi menggunakan model elastisitas pendapatan terhadap perubahan permintaan barang-barang konsumsi.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pengeluaran konsumsi rumahtangga di Nusa Tenggara Timur idealnya harus mencakup pula konsumsi yang dilakukan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur di luar wilayah dikurangi dengan konsumsi penduduk asing (luar Nusa Tenggara Timur) yang dilakukan di wilayah ini. Namun demikian karena keterbatasan data, komponen ini belum dapat ditaksir. Sehingga dalam hal ini terpaksa digunakan asumsi bahwa konsumsi penduduk Nusa Tenggara Timur sama dengan konsumsi penduduk luar Nusa Tenggara Timur yang dilakukan di wilayah ini.

b. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Data dasar yang digunakan untuk menghitung pengeluaran lembaga swasta nirlaba adalah hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Namun demikian karena jumlah sampel dalam SKLNP relatif kecil, maka diperlukan penyesuaian berdasarkan hasil pengumpulan data lain seperti SKPR dan sejenisnya.

Penghitungan pengeluaran konsumsi lembaga nirlaba dilakukan dengan menjumlahkan perkiraan biaya antara dari setiap lembaga nirlaba yang ada di Nusa Tenggara Timur.

c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

Sumber data yang digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi pemerintah adalah realisasi belanja rutin dan pembangunan baik dari APBN maupun APBD. Jadi dalam hal ini mencakup realisasi pengeluaran pemerintah pusat yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dan realisasi pengeluaran pemerintah daerah tingkat I, II dan pemerintahan desa.

Selanjutnya nilai pengeluaran konsumsi pemerintah Nusa Tenggara Timur diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, biaya perbaikan ringan dan pengeluaran rutin yang lain dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Hankam. Juga termasuk disini adalah belanja pegawai dan belanja bahan dari belanja pembangunan.

Untuk memperoleh nilai pengeluaran pemerintah pada masing-masing komponen dilakukan sebagai berikut:

(i). Belanja pegawai terdiri dari:

- Belanja pegawai dari belanja rutin yang terdiri dari upah gaji, tunjangan beras maupun uang, pakaian dinas dan lain-lain belanja pegawai baik Daerah, Pusat maupun Hankam.

- Belanja pegawai yang berasal dari belanja pembangunan diolah dari laporan realisasi keuangan proyek APBD dan proyek-proyek APBN.
- (ii). Belanja Barang mencakup:
- Belanja barang dari belanja rutin (tidak termasuk belanja barang modal)
 - Belanja barang dari belanja pembangunan diolah dari laporan realisasi keuangan proyek APBD dan proyek APBN.
- (iii). Biaya perbaikan ringan dan pemeliharaan rutin; seperti biaya perbaikan/pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan sebagainya.
- (iv). Belanja rutin lainnya; seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya.
- (v). Penyusutan barang modal.

Data realisasi pengeluaran keuangan Daerah Tingkat I, II dan Desa diperoleh dari laporan realisasi keuangan daerah masing-masing tingkat (K1, K2 dan K3).

Data mengenai realisasi anggaran rutin pemerintah pusat diperoleh dari setiap instansi jawatan tingkat Propinsi yang meliputi data belanja pegawai, belanja barang dan biaya pemeliharaan, sedang belanja pegawai dan belanja barang yang berasal dari belanja pembangunan berasal dari BAPPEDA Tingkat I yang meliputi data belanja pembangunan sektoral (dari APBN), Inpres SD, Inpres Desa (Bangdes), Inpres Kesehatan, Inpres Tingkat II, Inpres Pasar dan belanja pembangunan daerah yang bersumber dari Biro Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Data belanja pertahanan dan keamanan diperoleh dari masing-masing kesatuan militer di kabupaten dan propinsi (KOREM, DANSIONAL, DANLANUD, KOWIL, KEPOLISIAN), yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang.

Nilai pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga yang berlaku diperoleh dengan menjumlahkan nilai belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan dan belanja rutin lainnya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Hankam.

Sedangkan nilai konsumsi atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan mendeflasikan nilai atas dasar harga yang berlaku dengan Indeks Umum Harga Konsumen kota Kupang untuk belanja pegawai dan biaya perjalanan serta Indeks Umum HPB tanpa ekspor untuk belanja barang, biaya perbaikan ringan dan pemeliharaan rutin dan biaya rutin lainnya.

d. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Cara yang digunakan dalam menaksir nilai pembentukan modal tetap bruto Nusa Tenggara Timur adalah dengan pendekatan arus komoditi, yaitu menghitung nilai barang modal baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pembentukan modal tetap bruto hasil produksi lokal ditaksir dari nilai barang modal yang dihasilkan oleh sektor industri dan sektor konstruksi serta pembentukan modal tetap bruto yang dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan pembentukan modal tetap bruto yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur (melalui impor dan antar pulau masuk), ditaksir melalui arus barang-barang modal yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur melalui impor dari luar negeri dan antar pulau masuk (hasil pengolahan BPP laut di pelabuhan-pelabuhan laut yang ada di Nusa Tenggara Timur).

Sektor Industri

Barang-barang modal yang dihasilkan oleh sektor industri antara lain dihasilkan oleh industri galangan perahu layar/perahu motor, meubel dan alat-alat pertanian. Nilai barang modal diperoleh dari perhitungan PDRB sektoral, baik atas dasar harga berlaku, maupun atas dasar harga konstan 1993.

Sektor Konstruksi

Nilai barang modal yang dihasilkan oleh sektor bangunan ditaksir dengan menggunakan rasio barang modal terhadap total nilai output sektor konstruksi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 1993.

Sektor Pemerintahan

Nilai pembentukan modal tetap bruto oleh sektor pemerintahan antara lain terdiri dari biaya reboisasi dan penghijauan, pengadaan ternak bibit, sapi perah dan lain-lain yang diperoleh dari pengolahan realisasi belanja pembangunan (APBD dan APBN).

Sebenarnya pembentukan modal yang dilakukan oleh pemerintah mencakup pula biaya konstruksi dan industri, akan tetapi mengingat komponen ini sudah dihitung pada sektornya maka tidak dihitung lagi di sini.

Nilai atas dasar harga konstan 1993 ditaksir dengan cara mendeflasikan nilai pembentukan barang modal atas dasar harga berlaku dengan menggunakan Indeks Umum HPB tanpa ekspor.

Impor dan Antar Pulau Masuk

Pembentukan modal tetap bruto yang berasal dari impor dan antar pulau masuk pada dasarnya merupakan barang modal yang dihasilkan oleh sektor industri di luar wilayah Nusa Tenggara Timur. Barang modal ini antara lain berupa mesin-mesin, kendaraan, peralatan berat dan sebagainya.

Nilai barang-barang modal atas dasar harga konstan 1993 dari luar wilayah tersebut ditaksir dengan cara revaluasi.

e. Ekspor dan Antar Pulau Neto

Untuk menaksir besarnya nilai ekspor neto Nusa Tenggara Timur atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai ekspor dan antar pulau keluar dikurangi dengan nilai impor dan nilai antar pulau masuk. Datanya diperoleh dari Kanwil Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pusat Statistik.

Nilai atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan cara revaluasi.

f. Perubahan Stok

Perubahan stok pada dasarnya adalah perubahan persediaan barang-barang yang berasal dari pembelian (baik untuk keperluan produksi suatu kegiatan ekonomi maupun untuk dijual lagi), dan barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum terjual (baik dalam bentuk barang jadi maupun barang setengah jadi).

Pemegang stok terdiri dari produsen, pedagang dan pemerintah. Stok yang dikuasai oleh pemerintah mencakup barang-barang yang dibeli untuk keperluan strategi, seperti bahan pangan dan bahan bakar yang disediakan guna keperluan khusus (misalnya untuk mengatasi krisis dan sejenisnya).

Alat-alat berat seperti kapal dan lain-lain yang sedang dalam proses pengerjaan merupakan stok yang dikuasai oleh produsen. Sementara bangunan yang sedang dikerjakan tidak termasuk stok akan tetapi menjadi bagian dari pembentukan modal tetap bruto.

Mengingat keterbatasan data maka nilai perubahan stok dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan diperlakukan sebagai sisaan (residual) dari PDRB sektoral setelah dikurangi komponen-komponen penggunaan lainnya.

II. TINJAUAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN

- ✓ *Komposisi Penggunaan PDRB*
- ✓ *Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB*

II. TINJAUAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN

Sesuai dengan uraian terdahulu, PDRB dari sisi penggunaan akan mencakup seluruh produk akhir yang digunakan atau dikonsumsi oleh para konsumen akhir. Dengan kata lain PDRB dapat pula dipandang sebagai seluruh produk akhir yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir.

Permintaan akhir, yaitu permintaan yang bukan untuk keperluan produksi, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu permintaan akhir domestik dan permintaan akhir dari luar wilayah. Permintaan akhir domestik terdiri dari konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto. Sedangkan permintaan akhir dari luar wilayah terdiri dari ekspor (dari luar negeri) dan antar pulau keluar (dari wilayah lain di dalam negeri). Pada prakteknya, penyediaan produk akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu wilayah seringkali tidak mampu memenuhi seluruh permintaan akhir yang ada. Dalam hal ini maka perlu didatangkan produk akhir dari luar wilayah, yang terdiri dari impor dan antar pulau masuk.

Uraian berikut akan mengamati komposisi penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dan perkembangannya.

2.1 Komposisi Penggunaan PDRB

Komposisi penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dalam kurun 2000 sampai 2003 relatif tidak mengalami perubahan. Hal yang sama juga terjadi dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.1a, dapat dilihat bahwa proporsi terbesar penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dalam kurun 2000 sampai dengan 2003 adalah untuk memenuhi konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba. Pada tahun 2000 konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba di Nusa Tenggara Timur mencapai 78,11 persen dari seluruh PDRB, kemudian menurun pada tahun 2001 menjadi 76,76 persen. Pada tahun 2002-2003 terlihat menurun perlahan dimana proporsi konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba mencapai 72,84 persen dan 70,98 persen dari seluruh PDRB tahun 2002 dan 2003.

Tabel 2.1a
Komposisi Penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur
Atas Dasar Harga Berlaku

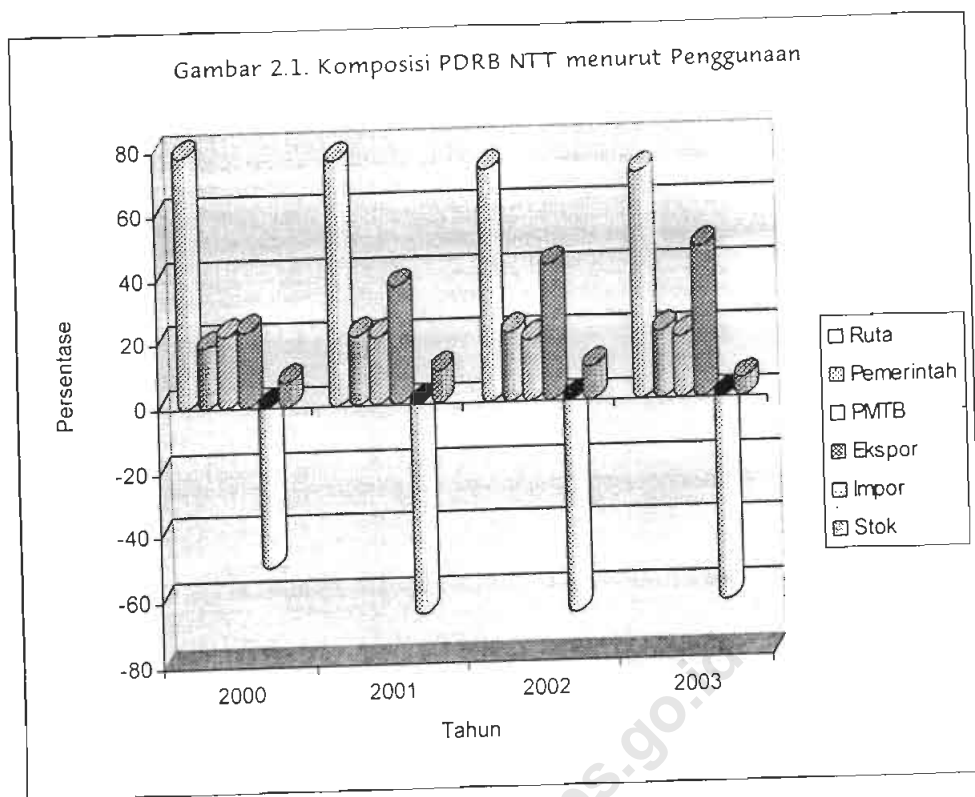
	(Persen)			
Rincian	2000	2001	2002 ^{e)}	2003 ^{f)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga ^{a)}	78,11	76,76	72,84	70,98
2. Konsumsi Pemerintah	18,62	21,65	21,77	20,95
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,33	20,58	18,97	18,99
4. Ekspor ^{b)}	23,30	36,37	42,07	46,79
5. Impor ^{c)} (-)	49,89	65,27	65,59	63,11
6. Perubahan Stok ^{d)}	7,53	9,90	9,93	5,39
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

- a) Termasuk pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba
- b) Untuk NTT termasuk antar pulau keluar
- c) Untuk NTT termasuk antar pulau masuk
- d) Angka residual
- e) Angka revisi
- f) Angka sementara

Penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi permintaan ekspor dan antar pulau keluar proporsinya merupakan kedua terbesar dan perkembangannya menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Pada tahun 2000, ekspor dan antar pulau keluar mencapai 23,30 persen dari nilai PDRB Nusa Tenggara Timur. Proporsi tersebut semakin meningkat hingga tahun 2003. Permintaan ekspor dan antar pulau keluar kondisinya kembali meningkat pada tahun 2001 dan 2002 dengan proporsi masing-masing menjadi sebesar 36,37 persen dan 42,07 persen terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2003 proporsi ekspor dan antar pulau keluar meningkat hingga mencapai 46,79 persen.

Pada tahun 2000 proporsi pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur cukup tinggi, yaitu sekitar 22,33 persen. Pada tahun 2001 proporsi tersebut masih tidak jauh berubah yaitu sekitar 20,58 persen. Tahun-tahun berikutnya proporsi pembentukan modal tetap bruto tersebut sedikit menurun menjadi 18,97 persen dan 18,99 persen terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur tahun 2002 dan 2003.



Sementara itu konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah di Nusa Tenggara Timur proporsinya merupakan yang terkecil. Pada tahun 2000 konsumsi pemerintah hanya 18,62 persen dari PDRB Nusa Tenggara Timur. Proporsi tersebut sedikit meningkat pada tahun 2001 dan 2002 menjadi 21,65 persen dan 21,77 persen. Kemudian sedikit menurun pada tahun berikutnya hingga menjadi 20,95 persen.

Perekonomian Nusa Tenggara Timur agaknya masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap wilayah lain. Hal ini dapat dilihat dari proporsi impor dan antar pulau masuk dalam kurun 2000-2003. Pada tahun 2000 proporsi impor dan antar pulau masuk baru mencapai 49,89 persen dari total PDRB Nusa Tenggara Timur. Kemudian melonjak tajam menjadi 65,27 persen pada tahun 2001. Pada tahun 2002 sedikit meningkat menjadi 65,59 persen dan akhirnya menjadi 63,11 persen pada tahun 2003. Angka terakhir ini menunjukkan bahwa sekitar 63,11 persen produk yang digunakan untuk memenuhi permintaan para konsumen akhir di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2003 terpaksa harus didatangkan melalui impor dan antar pulau masuk. Tingginya proporsi impor dalam perekonomian ini cukup mengkhawatirkan karena merupakan cerminan dari tingginya pengaruh 'luar' dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur.

Pola penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan pola penggunaan PDB pada level nasional. Konsumsi rumahtangga

dan ekspor memiliki proporsi yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Hanya saja proporsi konsumsi pemerintah dan impor dalam perekonomian Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan proporsi kedua komponen tersebut dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.1b menunjukkan komposisi penggunaan PDB Indonesia selama kurun waktu 2000-2003. Proporsi terbesar penggunaan PDB Nasional masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumahtangga. Sejak tahun 2000 pengeluaran konsumsi rumahtangga mencapai 67,26 persen dan berfluktuasi hingga mencapai 69,34 persen pada tahun 2003. Komposisi penggunaan PDB Nasional selama periode tersebut di atas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1b.

Tabel 2.1b
Komposisi Penggunaan PDB Indonesia
Atas Dasar Harga Berlaku

Rincian	(Persen)			
	2000	2001	2002 ^{c)}	2003 ^{a)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga ^{a)}	67,26	66,29	69,55	69,34
2. Konsumsi Pemerintah	7,18	7,73	8,21	9,16
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,81	21,40	20,25	19,72
4. Ekspor	(5,71)	(3,65)	(4,59)	(3,76)
5. Impor (-)	42,93	42,54	35,83	31,24
6. Perubahan Stok ^{b)}	33,47	34,31	29,26	25,70
PDB	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

- a) Termasuk pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba
- b) Angka residual
- c) Angka revisi
- d) Angka sementara

2.2 Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB

Walaupun pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba merupakan proporsi terbesar dalam PDRB Nusa Tenggara Timur, namun dalam kurun 2000-2003 mengalami laju pertumbuhan yang berfluktuasi (lihat Tabel 2.2). Pada tahun 2000 pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba memiliki laju pertumbuhan sebesar 6,62 persen dan 3,00 persen. Namun demikian pada tahun berikutnya pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta

nirlaba kembali menurun dan mengalami pertumbuhan sebesar 1,77 persen dan 0,48 persen. Pada tahun 2002 pertumbuhan konsumsi rumahtangga mencapai 4,25 persen dan 7,14 persen untuk lembaga swasta nir laba. Tahun 2003 pertumbuhan konsumsi rumahtangga meningkat hingga mencapai 7,23 persen dan pertumbuhan lembaga swasta nir laba sedikit menurun menjadi 0,38 persen.

Sementara itu pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan satu-satunya komponen yang tidak pernah mengalami pertumbuhan negatif dalam periode 1993-2003. Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 1993 adalah sebesar 13,59 persen, kemudian berfluktuasi hingga menjadi 14,05 persen tahun 1999. Dan kembali menurun menjadi 5,15 persen pada tahun 2000. Namun laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2001 - 2003 mengalami peningkatan hingga pertumbuhannya menjadi 6,87 persen, 2,56 persen dan 3,73 persen.

Laju pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur masih belum menggembirakan. Pada tahun 2000 laju pertumbuhan mencapai 7,33 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 6,07 persen pada tahun 2001 dan kembali meningkat hingga pada tahun 2003 mencapai 6,24 persen. Gambaran sepiantas ini memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas produksi yang dicerminkan oleh pembentukan modal tetap bruto (yang antara lain berupa pembelian baru untuk mesin atau barang modal lainnya) masih menghadapi masalah cukup serius dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur.

Ekspor dan antar pulau keluar Nusa Tenggara Timur selama periode 2000-2003 terlihat berfluktuasi. Pada tahun 2000 mengalami laju pertumbuhan negatif, yaitu minus 26,78 persen. Namun pada tahun 2001 ketika perekonomian Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan mengalami perbaikan, ekspor dan antar pulau keluar pun kondisinya ikut membaik, bahkan mengalami laju pertumbuhan yang tinggi, yaitu 65,12 persen. Sayangnya laju pertumbuhan tersebut kembali menjadi 19,42 persen pada tahun 2002 dan pada tahun 2003 laju pertumbuhan kembali menurun hingga mencapai 13,98 persen. Peningkatan volume dan banyaknya jenis komoditi yang diantarpulaukan mempengaruhi nilai antar pulau keluar pada tahun ini.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB NTT Atas Dasar Harga
Konstan 1993

(Persen)

Rincian	2000	2001	2002 ^{d)}	2003 ^{e)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga ^{a)}	9,62	2,25	11,39	7,61
2. Konsumsi Pemerintah	5,15	6,87	2,56	3,73
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,33	6,07	5,06	6,24
4. Ekspor ^{b)}	-26,78	65,12	19,42	13,98
5. Impor ^{c)} (-)	-8,57	48,16	10,75	3,70
PDRB	4,17	5,10	5,96	5,87

Keterangan:

- a) Termasuk pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba
- b) Untuk NTT termasuk antar pulau keluar
- c) Untuk NTT termasuk antar pulau masuk
- d) Angka revisi
- e) Angka sementara

Pola pertumbuhan impor dan antar pulau masuk ternyata hampir sama dengan pola pertumbuhan ekspor dan antar pulau keluar. Pada tahun 2000 pertumbuhan impor dan antar pulau masuk cukup memprihatinkan dimana mengalami laju pertumbuhan negatif yaitu mencapai minus 8,57 persen. Akan tetapi pada tahun 2001 laju pertumbuhan antar pulau masuk meningkat hingga mencapai 48,16 persen. Dan laju pertumbuhan impor dan antar pulau masuk pada tahun 2002 dan 2003 sedikit menurun mencapai 10,75 persen dan 3,70 persen.

III. PERKEMBANGAN KOMPONEN PENGUNAAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR

- ✓ *Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga*
- ✓ *Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba*
- ✓ *Pengeluaran Konsumsi Pemerintah*
- ✓ *Pembentukan Modal Tetap Bruto*
- ✓ *Ekspor dan Antar Pulau Neto*

III. PERKEMBANGAN KOMPONEN PENGUNAAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR

Ulasan pada bab ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan setiap komponen penggunaan PDRB secara lebih rinci. Pembahasan akan mencakup dari sisi komposisi (proporsi) dan pertumbuhannya

3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumahtangga yang dimaksudkan di sini hanyalah konsumsi rumahtangga saja, tanpa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh lembaga swasta nirlaba.

Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa sebagian besar pengeluaran konsumsi rumahtangga di Nusa Tenggara Timur adalah untuk membayar pengeluaran kelompok makanan. Pada tahun 2003 pengeluaran untuk kelompok makanan ini mencapai 74,57 persen. Namun masih lebih rendah bila dibanding pada saat krisis berlangsung sepanjang tahun 1998 proporsi konsumsi makanan yang mencapai sebesar 80,58 persen. Sedangkan pada tahun 1999 proporsi pengeluaran rumahtangga untuk kelompok makanan menurun tajam menjadi hanya 70,30 persen dan sedikit meningkat menjadi 72,01 persen pada tahun 2000, 74,58 persen pada tahun 2001 dan menjadi 75,42 persen pada tahun 2002 dan sebesar 74,57 persen pada tahun 2003.

Sementara dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan baik untuk kelompok makanan maupun bukan makanan pada periode 2000-2003 terlihat berfluktuasi. Pada tahun 2000 konsumsi kelompok makanan tumbuh 6,38 persen dan kelompok bukan makanan tumbuh 7,02 persen. Dan pada tahun 2001 pengeluaran konsumsi makanan tumbuh sebesar 0,81 persen dan konsumsi bukan makanan tumbuh sebesar 3,35 persen. Tahun 2002 pertumbuhan konsumsi makanan mencapai 5,70 persen dan bukan makanan mencapai 1,93 persen. Pada tahun 2003 pertumbuhan konsumsi makanan sebesar 3,66 persen sementara untuk kelompok bukan makanan tumbuh sebesar 13,18 persen.

Tabel 3.1
Proporsi Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kelompok Pengeluaran
Nusa Tenggara Timur

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002 ^{a)}	2003 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kelompok Makanan	72,01	74,58	75,42	74,57
2. Kelompok Bukan Makanan	27,99	25,42	24,58	25,43
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>(Juta Rupiah)</i>	4.941.681,54	5.739.373,68	6.297.957,64	6.803.628,64

Keterangan : a) Angka Revisi
b) Angka Sementara

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Konstan 1993
Menurut Kelompok Pengeluaran
Nusa Tenggara Timur

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002 ^{a)}	2003 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kelompok Makanan	6,38	0,81	5,70	3,66
2. Kelompok Bukan Makanan	7,02	3,35	1,93	13,18
JUMLAH	6,62	1,77	4,25	7,23

Keterangan : a) Angka Revisi
b) Angka Sementara

3.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Berbeda dengan pengeluaran konsumsi rumahtangga yang dapat dirinci menurut kelompok makanan dan bukan makanan, data yang tersedia untuk pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba hanya rincian menurut jenis lembaga, yaitu lembaga keagamaan dan lembaga sosial lainnya.

Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba di Nusa Tenggara Timur sepanjang kurun waktu 2000-2003 didominasi oleh lembaga keagamaan. Proporsi pengeluaran lembaga keagamaan pada kurun waktu tersebut berkisar antara 91,53 persen sampai dengan 96,41 persen terhadap total pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba. Sebaliknya pengeluaran konsumsi lembaga sosial lainnya hanya berkisar antara 3,59 persen sampai 8,47 persen.

Tabel 3.3
Proporsi Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Lembaga
Nusa Tenggara Timur

Jenis Pengeluaran	(Persen)			
	2000	2001	2002 ^{a)}	2003 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Lembaga Keagamaan	96,41	96,39	96,15	91,53
2. Lembaga Sosial Lainnya	3,59	3,61	3,85	8,47
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00
(Juta Rupiah)	23.989,69	25.884,98	28.215,21	30.126,80

Keterangan : a) Angka Revisi
b) Angka Sementara

Jika diperhatikan laju pertumbuhannya, tampak bahwa pengeluaran konsumsi lembaga keagamaan memiliki pola perkembangan yang sama dengan pengeluaran konsumsi lembaga sosial lainnya. Pada tahun 2000 pengeluaran konsumsi lembaga keagamaan mengalami pertumbuhan sebesar 3,00 persen (lihat Tabel 3.4). Pada tahun 2001 pertumbuhannya menurun tajam hingga mencapai 1,09 persen. Pada tahun 2002 laju pertumbuhannya meningkat hingga mencapai 6,36 persen dan akhirnya mencapai 0,36 persen tahun 2003. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi oleh lembaga keagamaan selama kurun waktu 2000-2003 terlihat berfluktuasi. Sementara itu pengeluaran konsumsi lembaga sosial lainnya juga mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi sepanjang periode 2000-2003. Laju pertumbuhan tertinggi justru terjadi pada tahun 2002, yaitu sebesar 28,13 persen. Pada tahun 2001 pertumbuhannya menurun cukup tajam hingga mencapai minus 13,49 persen. Pada tahun 2003 pertumbuhan pengeluaran lembaga sosial lainnya menikmati pertumbuhan sebesar 0,80 persen.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Jenis Lembaga
Nusa Tenggara Timur

Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002 ^{a)}	2003 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Lembaga Kegamaan	3,00	1,09	6,36	0,36
2. Lembaga Sosial Lainnya	3,00	-13,49	28,13	0,80
JUMLAH	3,00	0,48	7,14	0,38

Keterangan : a) Angka Revisi
b) Angka Sementara

3.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Proporsi terbesar pengeluaran konsumsi pemerintah di Nusa Tenggara Timur pada periode 2000-2003 adalah untuk belanja pegawai bruto, yaitu belanja pegawai sebelum dipotong pajak dan berbagai potongan lainnya (lihat Tabel 3.5). Pada tahun 2000 proporsi belanja pegawai bruto terhadap pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 81,37 persen dan secara sangat lambat meningkat hingga akhirnya sebesar 85,13 persen pada tahun 2001 dan 2002. Pada tahun 2003 proporsi belanja pegawai kembali menurun menjadi 83,96 persen.

Proporsi kedua terbesar dari pengeluaran konsumsi pemerintah adalah untuk belanja barang, yaitu berkisar antara 6,34 persen sampai dengan 8,81 persen dalam kurun 2000-2003. Urutan berikutnya adalah untuk belanja rutin lainnya, yang proporsinya berkisar antara 3,37 persen sampai dengan 4,92 persen dalam kurun waktu yang sama. Proporsi pengeluaran pemerintah untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin pada periode 2000-2003 berada pada kisaran 2,40 sampai dengan 2,68 persen. Sedangkan proporsi untuk biaya perjalanan dinas berkisar antara 2,22 sampai dengan 3,03 persen terhadap total pengeluaran konsumsi pemerintah dalam periode 2000-2003.

Tabel 3.5
Proporsi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenisnya
Nusa Tenggara Timur

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002 ^{a)}	2003 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Belanja Pegawai Bruto	81,37	85,13	85,13	83,96
2. Belanja Barang	8,81	6,34	6,34	6,66
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin	2,68	2,50	2,50	2,40
4. Biaya Perjalanan Dinas	2,22	2,65	2,65	3,03
5. Belanja Rutin Lainnya	4,92	3,37	3,37	3,94
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>(Juta Rupiah)</i>	<i>1.183.686,38</i>	<i>1.626.355,20</i>	<i>1.890.954,87</i>	<i>2.016.682,07</i>

Keterangan : a) Angka Revisi
b) Angka Sementara

Hampir semua jenis pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami peningkatan pada tahun 2003, kecuali pengeluaran untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin yang mengalami penurunan pada tahun 2003 (lihat Tabel 3.6). Pengeluaran untuk belanja barang pada tahun 2001 mencatat pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar minus 23,04 persen dan meningkat menjadi 2,25 persen pada tahun 2002 dan pada tahun 2003 menjadi 3,73 persen. Sementara pengeluaran untuk perjalanan dinas memperlihatkan fenomena yang cukup menarik. Pada tahun 2001 pengeluaran komponen ini menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi hingga mencapai 27,28 persen. Namun pada tahun 2002 dan 2003 pertumbuhannya menurun cukup tajam hingga mencapai 4,22 persen dan 8,03 persen. Secara umum, fenomena pada tahun 2003 memperlihatkan peningkatan pada hampir semua jenis pengeluaran pemerintah. Diduga pemberlakuan undang-undang daerah otonom dengan segala peraturan daerah mempengaruhi tingginya pengeluaran pada komponen-komponen ini.

Tabel 3.6
Laju Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Atas dasar Harga Konstan 1993 Menurut Jenisnya
Nusa Tenggara Timur

Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002 ^{a)}	2003 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Belanja Pegawai Bruto	6,17	11,81	2,56	3,70
2. Belanja Barang	7,13	-23,04	2,25	3,73
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin	-4,81	-0,13	2,56	2,02
4. Biaya Perjalanan Dinas	-17,11	27,28	4,22	8,03
5. Belanja Rutin Lainnya	3,68	-26,76	1,86	2,42
JUMLAH	5,15	6,87	2,56	3,73

Keterangan : a) Angka Revisi
b) Angka Sementara

3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto di Nusa Tenggara Timur dalam kurun 2000-2003 ternyata didominasi oleh barang modal domestik (lihat Tabel 3.7). Namun demikian hal ini harus dilihat lebih cermat lagi. Sebagian besar pembentukan modal tetap bruto domestik pada kurun 2000-2003 tersebut ternyata berupa output dari sektor konstruksi yang antara lain berupa bangunan. Dengan demikian kandungan lokal dari pembentukan modal tetap bruto ini sebagian besar adalah berupa bangunan, yang peranannya terhadap peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian kurang terlalu besar.

Sementara itu proporsi pembentukan modal untuk peningkatan kapasitas produksi agaknya belum terlalu besar. Hal ini ditunjukkan oleh masih relatif kecilnya proporsi pembentukan modal dari impor dan antar pulau masuk dan dari sektor industri domestik. Proporsi pembentukan modal ini dalam kurun 2000-2003 masih kurang dari 0,82 persen.

Tabel 3.7
Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Asal Barang
Nusa Tenggara Timur

Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002 ^{a)}	2003 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Impor dan Antar Pulau Masuk	12,96	12,21	12,31	14,00
2. Domestik	87,04	87,79	87,69	86,00
a. Industri	0,75	0,79	0,81	0,81
b. Konstruksi	84,84	85,42	85,39	83,75
c. Pemerintah *)	1,45	1,58	1,49	1,43
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>(Juta Rupiah)</i>	<i>1.419.788,26</i>	<i>1.545.797,56</i>	<i>1.647.476,82</i>	<i>1.828.090,24</i>

Keterangan : a) Angka Revisi

b) Angka Sementara

*) tidak termasuk pengeluaran pemerintah untuk pembentukan modal konstruksi dan industri yg dikelola pemerintah

Laju pertumbuhan pembentukan modal tetap menurut asal barang adalah seperti yang disajikan pada Tabel 3.8. Pembentukan modal tetap bruto yang berasal dari industri domestik pada periode tahun 2000-2003 cenderung berfluktuasi. Hal yang sama terjadi juga pada pertumbuhan pembentukan modal dari sektor impor dan antar pulau masuk. Pada periode tersebut diatas laju pertumbuhan untuk impor dan antar pulau masuk tertinggi tercatat pada tahun 2002 yakni mencapai 11,34 persen dan terendah pada tahun 2000 yakni sebesar 0,21 persen.

Tabel 3.8
Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Asal Barang
Nusa Tenggara Timur

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002 ^{a)}	2003 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Impor dan Antar Pulau Masuk	0.21	3.92	11.34	2.12
2. Domestik	8.30	6.34	4.28	6.78
a. Industri	56.55	6.02	2.04	10.23
b. Konstruksi	6.80	6.17	4.40	6.79
c. Pemerintah *)	45.70	11.69	2.07	4.68
JUMLAH	7.33	6.07	5.06	6.24

Keterangan : a) Angka Revisi

b) Angka Sementara

*) tidak termasuk pengeluaran pemerintah untuk pembentukan modal konstruksi dan industri yg dikelola pemerintah

3.5 Ekspor dan Antar Pulau Neto

Nilai ekspor dan antar pulau keluar dari Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2000-2003 cenderung semakin meningkat (lihat Tabel 3.9). Pada tahun 2000 nilai ekspor dan antar pulau keluar mencapai 1.481.512,10 juta rupiah dan meningkat terus hingga tahun 2003 mencapai 4.505.028,95 juta rupiah. Walaupun nilai ekspor dan antar pulau keluar tersebut relatif tinggi, namun nilai impor dan antar pulau masuk ke Nusa Tenggara Timur ternyata jauh lebih tinggi lagi. Pada tahun 2000 nilai impor dan antar pulau masuk ke Nusa Tenggara Timur mencapai 3.171.992,45 juta rupiah, dan terus meningkat hingga menjadi 6.075.293,07 juta rupiah pada tahun 2003.

Kondisi tersebut mengakibatkan neraca perdagangan luar negeri dan antar pulau di Nusa Tenggara Timur terus menanggung defisit dalam kurun 2000-2003. Besarnya defisit pada tahun 2000 mencapai 1.690.480,35 juta rupiah. Pada periode tahun 2001-2002 defisit neraca perdagangan tersebut semakin meningkat hingga mencapai 2.170.620,99 juta rupiah pada tahun 2001 dan 2.042.516,05 juta rupiah pada tahun 2002. Pada tahun 2003 defisit neraca perdagangan sedikit menurun menjadi 1.570.264,12 juta rupiah.

Tabel 3.9
Neraca Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau
Atas Dasar Harga Berlaku
Nusa Tenggara Timur

Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002 ^{a)}	2003 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	1.481.512.10	2.731.584.83	3.653.761.69	4.505.028.95
2. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	3.171.992.45	4.902.205.82	5.696.277.74	6.075.293.07
Ekspor Neto c)	-1.690.480.35	-2.170.620.99	-2.042.516.05	-1.570.264.12

Keterangan : a) Angka Revisi
b) Angka Sementara
c) Ekspor dikurangi impor

Jika diamati lebih jauh, ternyata peran perdagangan antar pulau lebih besar dibandingkan dengan peran perdagangan luar negerinya (lihat Tabel 3.10). Dalam kurun 2000-2003 peranan perdagangan antar pulau keluar berkisar antara 61 sampai 92 persen terhadap total ekspor dan antar pulau keluar. Begitu juga peranan perdagangan antar pulau masuk memiliki peranan yang cukup besar terhadap total impor dan antar pulau masuk. Pada tahun 2000 peran perdagangan antar pulau masuk mencapai 89,72 persen. Dan proporsi tersebut berfluktuasi hingga menjadi 79,75 persen pada tahun 2003. Proporsi perdagangan antar pulau masuk selama periode itu tertinggi tercatat pada tahun 2000 yang mencapai 89,72 persen sementara proporsi impor tertinggi tercatat pada tahun 2002 sebesar 20,62 persen. Peningkatan proporsi impor pada tahun 2000 ini kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya permintaan konsumsi orang asing (baik dalam rangka keperluan politik maupun sosial) yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun tersebut.

Tabel 3.10
Komposisi Komponen Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau
Atas Dasar Harga Berlaku
Nusa Tenggara Timur

Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002 ^{a)}	2003 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	100,00	100,00	100,00	100,00
- Ekspor	7,96	18,22	32,66	38,31
- Antar Pulau keluar	92,04	81,78	67,34	61,69
2. Impor dan Antar Pulau Masuk	100,00	100,00	100,00	100,00
- Impor	10,28	18,94	20,62	20,25
- Antar Pulau Masuk	89,72	81,06	79,38	79,75

Keterangan : a) Angka Revisi
b) Angka Sementara

Jika diperhatikan laju pertumbuhannya, tampak bahwa antara impor dan antar pulau masuk memiliki kesamaan pola perkembangan dengan ekspor dan antar pulau keluar (lihat Tabel 3.11). Pada tahun 2000 masing-masing mengalami pertumbuhan negatif (kecuali ekspor luar negeri dan antar pulau masuk). Pada tahun 2001 terjadi peningkatan yang cukup tajam baik impor dan antar pulau masuk maupun ekspor dan antar pulau keluar. Selanjutnya pada tahun 2003 baik ekspor dan antar pulau keluar maupun impor dan antar pulau masuk menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Namun demikian jika dilihat lebih rinci ke masing-masing komponen tampak bahwa masing-masing memiliki kecenderungan yang berbeda. Pada tahun 2000 nilai ekspor masih mengalami pertumbuhan sebesar 0,50 persen, kemudian meningkat sebesar 317,75 persen pada tahun 2001. Pada tahun 2002 ekspor kembali meningkat, tetapi hanya sebesar 135,36 persen dan menurun tajam hingga menjadi 37,25 persen pada tahun 2003. Sementara itu pertumbuhan antar pulau keluar pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar minus 27,54 persen, kemudian meningkat tajam sebesar 55,33 persen pada tahun 2001. Pada tahun 2002 laju pertumbuhan antar pulau keluar meningkat menjadi 7,33 persen dan sedikit meningkat pada tahun 2003 menjadi 8,66 persen.

Laju pertumbuhan impor luar negeri pada tahun 2000 menurun hingga mencapai minus 70,50 persen. Sedangkan pada tahun 2001 impor mengalami

pertumbuhan yang tinggi, yaitu 182,91 persen, sementara laju pertumbuhan antar pulau masuk adalah 33,27 persen. Pada tahun 2002 laju pertumbuhan antar pulau masuk mencapai sebesar 8,35 persen sementara impor luar negeri menikmati laju pertumbuhan sebesar 20,60 persen. Pada tahun 2003 laju pertumbuhan antar pulau masuk turun menjadi 4,21 persen sementara impor luar negeri hanya menikmati laju pertumbuhan 1,79 persen.

Tabel 3.11
Laju Pertumbuhan Komponen Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau
Atas Dasar Harga Konstan 1993
Nusa Tenggara Timur

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002 ^{a)}	2003 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	-26,78	65,12	19,42	13,98
- Ekspor	0,50	317,75	135,36	37,25
- Antar Pulau keluar	-27,54	55,33	7,33	8,66
2. Impor dan Antar Pulau Masuk	-8,57	48,66	10,75	3,70
- Impor	-70,50	182,91	20,60	1,79
- Antar Pulau Masuk	20,42	33,27	8,35	4,21
Ekspor Neto c)	74,37	17,18	-12,60	-34,16

Keterangan : a) Angka Revisi
b) Angka Sementara
c) Ekspor dikurangi impor

TABEL-TABEL LAMPIRAN

<https://ntbps.go.id>

Tabel 1
Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur
Tahun 2000-2003

(Ribu Rupiah)

Rincian	2000	2001	2002 ¹⁾	2003 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.941.681.536	5.739.373.677	6.297.957.642	6.803.628.639
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	23.989.690	25.884.976	28.215.211	30.126.798
3. Konsumsi Pemerintah	1.183.686.379	1.626.355.201	1.890.954.869	2.016.682.067
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.419.788.261	1.545.797.565	1.647.476.820	1.828.090.238
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	1.481.512.103	2.731.584.826	3.653.761.693	4.505.028.953
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	3.171.992.449	4.902.205.819	5.696.277.742	6.075.293.069
7. Perubahan Stok *)	478.891.293	743.880.846	862.210.077	519.007.395
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.357.556.813	7.510.671.272	8.684.298.570	9.627.271.021
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993				
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.755.019.413	1.786.033.236	1.862.027.357	1.996.661.382
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	15.508.274	15.582.743	16.695.152	16.758.722
3. Konsumsi Pemerintah	789.124.250	843.319.426	864.938.883	897.218.163
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	568.345.669	602.857.182	633.338.920	672.838.304
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	657.053.030	1.084.941.664	1.295.600.886	1.476.672.957
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	1.000.570.763	1.487.488.267	1.647.417.708	1.708.296.197
7. Perubahan Stok *)	167.891.940	257.812.611	262.741.060	129.049.418
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.952.371.813	3.103.058.595	3.287.924.550	3.480.902.749

Keterangan : *) Residual
1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 2
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan
Tahun 2000-2003

(Persen)

Rincian	2000	2001	2002 ¹⁾	2003 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
1. Konsumsi Rumah Tangga	77,73	76,42	72,52	70,67
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	0,38	0,34	0,32	0,31
3. Konsumsi Pemerintah	18,62	21,65	21,77	20,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,33	20,58	18,97	18,99
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	23,30	36,37	42,07	46,79
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	49,89	65,27	65,59	63,11
7. Perubahan Stok *)	7,53	9,90	9,93	5,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993				
1. Konsumsi Rumah Tangga	59,44	57,56	56,63	57,36
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	0,53	0,50	0,51	0,48
3. Konsumsi Pemerintah	26,73	27,18	26,31	25,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	19,25	19,43	19,26	19,33
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	22,26	34,96	39,40	42,42
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	33,89	47,94	50,11	49,08
7. Perubahan Stok *)	5,69	8,31	7,99	3,71
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *) Residual
1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 3
Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan
Tahun 2000-2003

(Persen)

Rincian	2000	2001	2002 ¹⁾	2003 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
1. Konsumsi Rumah Tangga	118,56	116,14	109,73	108,03
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	113,32	107,90	109,00	106,78
3. Konsumsi Pemerintah	121,82	137,40	116,27	106,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	115,28	108,88	106,58	110,96
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	97,51	184,38	133,76	123,30
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	100,30	154,55	116,20	106,65
7. Perubahan Stok *)	55,15	155,33	115,91	60,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	113,17	118,14	115,63	110,86
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993				
1. Konsumsi Rumah Tangga	106,62	101,77	104,25	107,23
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	103,00	100,48	107,14	100,38
3. Konsumsi Pemerintah	105,15	106,87	102,56	103,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	107,33	106,07	105,06	106,24
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	73,22	165,12	119,42	113,98
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	91,43	148,66	110,75	103,70
7. Perubahan Stok *)	186,35	153,56	101,91	49,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	104,17	105,10	105,96	105,87

Keterangan : *) Residual
1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 4
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan
Tahun 2000-2003

(Persen)

Rincian (1)	2000 (2)	2001 (3)	2002 ¹⁾ (4)	2003 ²⁾ (5)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
1. Konsumsi Rumah Tangga	426,40	495,23	543,43	587,06
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	185,54	200,19	218,22	233,00
3. Konsumsi Pemerintah	257,61	353,94	411,53	438,89
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	238,68	259,86	276,96	307,32
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	296,75	547,14	731,86	902,37
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	462,19	714,31	830,01	885,24
7. Perubahan Stok *)	785,41	1.220,01	1.414,08	851,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	302,72	357,63	413,51	458,41
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993				
1. Konsumsi Rumah Tangga	151,43	154,11	160,67	172,29
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	119,94	120,52	129,12	129,61
3. Konsumsi Pemerintah	171,74	183,53	188,24	195,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	95,54	101,35	106,47	113,11
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	131,61	217,32	259,51	295,78
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	145,79	216,74	240,05	248,92
7. Perubahan Stok *)	275,35	422,83	430,91	211,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	140,58	147,76	156,56	165,75

Keterangan : *) Residual
1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 5
Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan
Tahun 2000-2003

(Persen)

Rincian	2000	2001	2002 ¹⁾	2003 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	281,57	321,35	338,23	340,75
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	154,69	166,11	169,00	179,77
3. Konsumsi Pemerintah	150,00	192,85	218,62	224,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	249,81	256,41	260,13	271,70
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	225,48	251,77	282,01	305,08
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	317,02	329,56	345,77	355,63
7. Perubahan Stok *)	285,24	288,54	328,16	402,18
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	215,34	242,04	264,13	276,57

Keterangan : *) Residual
1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 6
Konsumsi Rumah Tangga
Nusa Tenggara Timur
Tahun 2000-2003

(Ribu Rupiah)

Rincian	2000	2001	2002 ¹⁾	2003 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
1. Kelompok Makanan	3558751 725	4280379189	4.749.688 691	5 073.571 523
2. Kelompok Bukan Makanan	1382929 811	1458994488	1.548.268 951	1 730.057.116
JUMLAH	4.941.681.536	5.739.373.677	6.297.957.642	6.803.628.639
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993				
1. Kelompok Makanan	1.091.823 057	1.100.648.059	1.163.388.983	1.205.971.949
2. Kelompok Bukan Makanan	663.196.356	685.385.177	698.638.374	790.689 434
JUMLAH	1.755.019.413	1.786.033.236	1.862.027.357	1.996.661.383

Keterangan : 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 7
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
Nusa Tenggara Timur
Tahun 2000-2003

(Ribu Rupiah)

Rincian	2000	2001	2002 ¹⁾	2003 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
1. Lembaga Keagamaan	23.127.372	24.949.253	27.130.276	27.573.628
2. Lembaga Sosial Lainnya	862.318	935.723	1.084.935	2.553.170
JUMLAH	23.989.690	25.884.976	28.215.211	30.126.798
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993				
1. Lembaga Keagamaan	14.860.778	15.022.615	15.977.443	16.035.271
2. Lembaga Sosial Lainnya	647.496	560.128	717.709	723.451
JUMLAH	15.508.274	15.582.743	16.695.152	16.758.722

Keterangan : 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 8
Konsumsi Pemerintah
Nusa Tenggara Timur
Tahun 2000-2003

(Ribu Rupiah)

Rincian	2000	2001	2002 ¹⁾	2003 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
1. Belanja Pegawai Bruto	963.121.992	1.384.541.780	1.609.799.642	1.693.245.411
2. Belanja Barang	104.272.746	103.170.399	119.955.695	134.372.459
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin	31.704.452	40.708.564	47.331.639	48.498.990
4. Biaya Perjalanan Dinas	26.314.479	43.060.491	50.066.212	61.025.207
5. Belanja Rutin Lainnya	58.272.710	54.873.967	63.801.680	79.540.000
JUMLAH	1.183.686.379	1.626.355.201	1.890.954.869	2.016.682.067
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993				
1. Belanja Pegawai Bruto	642.081.326	717.931.101	736.336.085	763.566.790
2. Belanja Barang	69.515.164	53.497.294	54.699.694	56.741.071
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin	21.136.301	21.108.748	21.649.895	22.087.266
4. Biaya Perjalanan Dinas	17.542.986	22.328.301	23.270.230	25.138.668
5. Belanja Rutin Lainnya	38.848.473	28.453.982	28.982.980	29.684.368
JUMLAH	789.124.250	843.319.427	864.938.883	897.218.163

Keterangan: 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 9
Pembentukan Modal tetap Bruto
Nusa Tenggara Timur
Tahun 2000-2003

(Ribu Rupiah)

Asal Barang	2000	2001	2002 ¹⁾	2003 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
1. Impor dan Antar Pulau Masuk	183.950.676	188.703.534	202.785.801	256.017.274
2. Domestik	1.235.837.585	1.357.094.031	1.444.691.019	1.572.072.964
a. Industri	10.665.354	12.287.108	13.386.546	14.854.118
b. Konstruksi	1.204.533.909	1.320.354.189	1.406.824.707	1.531.055.356
c. Pemerintah*)	20.638.322	24.452.734	24.479.765	26.163.490
JUMLAH	1.419.788.261	1.545.797.565	1.647.476.820	1.828.090.238
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993				
1. Impor dan Antar Pulau Masuk	63.626.239	66.120.710	73.620.307	75.182.306
2. Domestik	504.719.430	536.736.472	559.718.613	597.655.998
a. Industri	8.363.672	8.867.042	9.047.981	9.973.163
b. Konstruksi	480.171.378	509.793.302	532.219.733	568.368.896
c. Pemerintah*)	16.184.380	18.076.129	18.450.899	19.313.938
JUMLAH	568.345.669	602.857.182	633.338.920	672.838.304

Keterangan: 1) Angka Revisi

2) Angka Sementara

*) Tidak termasuk pengeluaran pemerintah untuk pembentukan modal, konstruksi dan industri yg dikelola pemerintah

Tabel 10
Ekspor Neto Nusa Tenggara Timur
Tahun 2000-2003

(Ribu Rupiah)

Rincian	2000	2001	2002 ¹⁾	2003 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	1.481.512.103	2.731.584.826	3.653.761.693	4.505.028.953
a. Ekspor	117.881.214	497.777.076	1.193.384.259	1.725.872.607
b. Antar Pulau Keluar	1.363.630.889	2.233.807.750	2.460.377.434	2.779.156.346
2. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	3.171.992.449	4.902.205.819	5.696.277.742	6.075.293.069
a. Impor	326.111.561	928.496.494	1.174.306.565	1.230.119.580
b. Antar Pulau Masuk	2.845.880.888	3.973.709.325	4.521.971.177	4.845.173.489
EKSPOR NETO¹⁾	-1.690.480.346	-2.170.620.993	-2.042.516.049	-1.570.264.116
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993				
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	657.053.030	1.084.941.664	1.295.600.886	1.476.672.957
a. Ekspor	24.509.668	102.389.549	240.981.773	330.737.423
b. Antar Pulau Keluar	632.543.362	982.552.115	1.054.619.113	1.145.935.534
2. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	1.000.570.763	1.487.488.267	1.647.417.708	1.708.296.197
a. Impor	102.905.690	291.129.580	351.111.456	357.395.002
b. Antar Pulau Masuk	897.665.073	1.196.358.687	1.296.306.252	1.350.901.195
EKSPOR NETO¹⁾	-343.517.733	-402.546.603	-351.816.822	-231.623.240

Keterangan: 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 11
 Penggunaan Produk Domestik Bruto Indonesia
 Atas Dasar Harga Yang Berlaku
 Tahun 2000-2003

(Milyar Rupiah)

Jenis Penggunaan	2000	2001	2002 ¹⁾	2003 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	850,818.7	972,938.3	1,120,164.0	1,238,891.7
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	90,779.7	113,416.1	132,218.7	163,701.3
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	275,881.3	314,065.8	326,165.2	352,360.5
4. Perubahan Stok *)	(72,235.5)	(53,623.9)	(73,876.0)	(67,257.5)
5. Ekspor Barang dan Jasa	542,992.4	624,340.8	577,081.5	558,091.4
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	423,317.9	503,482.3	471,188.4	459,096.5
7. Produk Domestik Bruto	1,264,918.7	1,467,654.8	1,610,565.0	1,786,690.9

Keterangan: 1) Angka Revisi
 2) Angka Sementara

Tabel 12
 Penggunaan Produk Domestik Bruto Indonesia
 Atas Dasar Harga Konstan 1993
 Tahun 2000-2003

(Milyar Rupiah)

Jenis Penggunaan	2000	2001	2002 ¹⁾	2003 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	276,377.2	285,674.7	296,559.3	308,477.4
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	28,767.8	31,351.5	35,362.4	38,842.8
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	89,389.1	95,197.1	95,396.9	96,695.7
4. Perubahan Stok *)	(13,794.2)	(13,042.2)	(17,568.5)	(19,561.8)
5. Ekspor Barang dan Jasa	116,193.6	119,600.2	118,920.0	123,724.0
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	98,916.6	107,027.7	101,727.1	103,724.6
7. Produk Domestik Bruto	398,016.9	411,753.6	426,943.0	444,453.5

Keterangan: 1) Angka Revisi
 2) Angka Sementara

Tabel 13
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Indonesia
Atas Dasar Harga Yang Berlaku Menurut Penggunaan
Tahun 2000-2003

(Persen)

Jenis Penggunaan	2000	2001	2002 ¹⁾	2003 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	67,26	66,29	69,55	69,34
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,18	7,73	8,21	9,16
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,81	21,40	20,25	19,72
4. Perubahan Stok *)	(5,71)	(3,65)	(4,59)	(3,76)
5. Ekspor Barang dan Jasa	42,93	42,54	35,83	31,24
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	33,47	34,31	29,26	25,70
PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 14
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Indonesia
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Penggunaan
Tahun 2000-2003

(Persen)

Jenis Penggunaan	2000	2001	2002 ¹⁾	2003 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	69,44	69,38	69,46	69,41
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,23	7,61	8,28	8,74
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,46	23,12	22,34	21,76
4. Perubahan Stok *)	(3,47)	(3,17)	(4,11)	(4,40)
5. Ekspor Barang dan Jasa	29,19	29,05	27,85	27,84
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	24,85	25,99	23,83	23,34
PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 15
Indeks Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia
Atas Dasar Harga Yang Berlaku Menurut Penggunaan
Tahun 2000-2003

(Persen)

Jenis Penggunaan	2000	2001	2002 ¹⁾	2003 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	440,93	504,22	580,52	642,05
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	305,07	381,14	444,33	550,13
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	318,32	362,38	376,34	406,57
4. Ekspor Barang dan Jasa	615,42	707,62	654,06	632,54
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	540,06	642,34	601,14	585,71
PRODUK DOMESTIK BRUTO	383,57	445,05	488,38	541,79

Keterangan: 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 16
Indeks Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Penggunaan
Tahun 2000-2003

(Persen)

Jenis Penggunaan	2000	2001	2002 ¹⁾	2003 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	143,23	148,05	153,69	159,87
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	96,68	105,36	118,84	130,53
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	103,14	109,84	110,07	111,57
4. Ekspor Barang dan Jasa	131,69	135,55	134,78	140,23
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	126,20	136,54	129,78	132,33
PRODUK DOMESTIK BRUTO	120,69	124,86	129,46	134,77

Keterangan: 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Beckerman, W. (1968) *An introduction to national income analysis*, Weidenfeld and Nicholson
- BPS (2000) *Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kotamadya* : Tata Cara Penghitungan Menurut Penggunaan, Buku 3
- BPS (2002) *Laporan Perekonomian Indonesia 2003*
- BPS (2004) *Pendapatan Nasional Indonesia 2000 - 2003*
- BPS NTT (2003) *Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan 1993 -2002*
- Glasson, J. (1990) *Pengantar Perencanaan Regional*, diterjemahkan oleh Paul Sitohang, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Marsisno, W. (2000) " *PDRB Menurut Penggunaan dan Manfaatnya dalam Perencanaan Pembangunan* ", naskah bahan diskusi intern. tidak dipublikasikan
- Partadiredja, A. (1993) *Perhitungan Pendapatan Nasional*, cetakan ke delapan, LP3ES
- Prayitno, H. Santosa, B. (1996) *Ekonomi Pembangunan*, Ghalia Indonesia
- Todaro, M. P. (1986) *Perencanaan Pembangunan : Model dan Metode*. dialihbahasakan oleh Siswo Suyanto, CV Inter Media

<https://ntt.bps.go.id>

BPS

Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur

Jl. R. Suprpto No. 5, Kupang 85111

Telp. (0380) 826289, 821755, Fax. (0380) 833124

e-mail : bps5300@kupang.wasantara.net.id